

**PENGUMUMAN PEMELIHARAAN AHU ONLINE TERKAIT PENYESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa pelayanan jasa hukum melalui Sistem AHU Online tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu karena sedang dilakukan penyesuaian tarif PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Layanan Jasa Hukum yang tidak dapat diakses dikarenakan penyesuaian tersebut adalah :

1. Layanan Badan Hukum
 - a. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
 - b. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
 - c. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas;
 - d. Perbaikan Isian Data Perseroan Terbatas;
 - e. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan;
 - f. Pesan Nama Perkumpulan;
 - g. Perbaikan Isian Data Yayasan dan Perkumpulan;
 - h. Informasi tentang Data Perkumpulan;
 - i. Informasi tentang Data Yayasan dalam Daftar Yayasan.
2. Layanan Notariat
 - a. Pengangkatan Notaris Pindahan;
 - b. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
 - c. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar dan Alamat Kantor) Notaris
3. Layanan Kewarganegaraan (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik)
 - a. Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan RI atas permohonan sendiri kepada Presiden RI;
 - b. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;
 - c. Permohonan Surat Keputusan tentang tetap menjadi Warga Negara Indonesia;
4. Layanan Badan Usaha (Sistem Administrasi Badan Usaha)
 - a. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer;
 - b. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Firma;
 - c. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Perdata.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM